

KONSEP DASAR PENGAWASAN DALAM MANAJEMEN PELATIHAN DAKWAH

Elsa Sabillah Bahri¹, Novia Kurnia Cahya², Dimas Tri Frasetiyo³, M Nauval Hazieq⁴,
Diana Septiani⁵

¹²³⁴⁵Manajemen Haji dan Umrah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
Manajemen Pelatihan Dakwah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: sabilae212@gmail.com, noviakurniacahya15@gmail.com, dimas3f31@gmail.com,
muhammadhazieqnauval@gmail.com, nanasep2409@gmail.com

ABSTRAK

Pengawasan merupakan fungsi penting dalam manajemen pelatihan dakwah yang berperan memastikan seluruh proses pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan dakwah Islam. Penelitian ini membahas konsep dasar pengawasan dalam manajemen pelatihan dakwah yang mencakup pengawasan preventif, represif, dan korektif. Melalui metode deskriptif-kualitatif, kajian ini menyoroti prinsip objektivitas, kontinuitas, partisipatif, dan konstruktif dalam penerapan pengawasan agar pelatihan dakwah berjalan efektif dan efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol administratif, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral dan spiritual bagi para dai agar mampu berdakwah secara profesional sesuai nilai-nilai Islam.

Kata kunci: *pengawasan, manajemen pelatihan, dakwah, efektivitas, nilai Islam.*

ABSTRACT

Supervision is a crucial function in the management of da'wah training, ensuring that all activities align with Islamic preaching objectives. This study discusses the fundamental concept of supervision in da'wah training management, encompassing preventive, repressive, and corrective control. Using a descriptive-qualitative approach, it highlights the principles of objectivity, continuity, participation, and constructiveness in implementing supervision to enhance the effectiveness and efficiency of da'wah training. The findings indicate that supervision serves not only as an administrative control tool but also as a medium for moral and spiritual development, enabling da'i to preach professionally in accordance with Islamic values.

Keywords: *supervision, training management, da'wah, effectiveness, Islamic values.*

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 588

Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tasdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam kegiatan dakwah, pelatihan memiliki peran penting untuk membentuk kader dai yang kompeten, berakhlak, dan mampu menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang bijaksana. Namun, keberhasilan pelatihan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan pelaksanaannya saja, melainkan juga oleh fungsi pengawasan yang efektif. Pengawasan

berfungsi sebagai alat untuk memastikan seluruh kegiatan pelatihan berjalan sesuai dengan rencana, standar, serta tujuan dakwah yang telah ditetapkan.

Dalam praktiknya, masih banyak lembaga dakwah yang belum memiliki sistem pengawasan yang terukur dan berkelanjutan. Evaluasi pelatihan sering dilakukan secara subjektif, tanpa instrumen yang jelas, sehingga hasilnya kurang mampu memberikan umpan balik yang konstruktif. Selain itu, tantangan era digital juga menuntut lembaga dakwah untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan teknologi, di mana pengawasan tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui media daring dan sistem informasi.

Fungsi pengawasan dalam manajemen pelatihan dakwah tidak semata-mata menilai kinerja administratif, tetapi juga menilai dimensi spiritual, moral, dan sosial dari proses pelatihan. Melalui pengawasan yang efektif, organisasi dakwah dapat memastikan bahwa materi dan metode pelatihan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan dalam manajemen pelatihan dakwah menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas pelatihan, membentuk karakter dai yang profesional, serta mendukung keberhasilan dakwah Islam di tengah dinamika masyarakat modern.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dasar pengawasan dalam manajemen pelatihan dakwah?
2. Apa saja prinsip dan tahapan yang diperlukan agar pengawasan pelatihan dakwah berjalan efektif?
3. Bagaimana penerapan pengawasan dapat meningkatkan kualitas pelatihan dakwah dan kompetensi dai?

Tujuan Masalah

1. Untuk menjelaskan konsep dasar pengawasan dalam manajemen pelatihan dakwah.
2. Untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip penting dalam pelaksanaan pengawasan dakwah.
3. Untuk mengetahui hubungan antara efektivitas pengawasan dan peningkatan kualitas pelatihan dakwah

TINJAUAN PUSAKA

Konsep pengawasan dalam manajemen telah lama menjadi perhatian penting dalam dunia organisasi, termasuk dalam konteks pelatihan dakwah. Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama manajemen selain perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. George R. Terry (2013) mendefinisikan pengawasan sebagai proses untuk menentukan apa yang telah dicapai, menilai pelaksanaan kerja, serta melakukan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan dari rencana. Definisi ini menekankan bahwa pengawasan bukan sekadar kegiatan memeriksa, melainkan suatu proses sistematis yang bertujuan menjaga kesesuaian antara rencana dan hasil yang diperoleh.

Dalam konteks manajemen dakwah, pengawasan memiliki makna yang lebih luas. Ia tidak hanya menyangkut evaluasi administratif terhadap pelatihan, tetapi juga mencakup pembinaan spiritual dan moral bagi para dai. Didin Hafidhuddin (2007) menjelaskan bahwa pengawasan dalam perspektif Islam terbagi menjadi dua bentuk, yaitu pengawasan internal (*muraqabah*) dan eksternal. Pengawasan internal bersumber dari keimanan seseorang kepada Allah SWT yang mendorongnya untuk selalu berbuat benar karena merasa diawasi oleh Allah. Sementara pengawasan eksternal merupakan sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin, panitia, atau lembaga untuk memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan organisasi dakwah.

Menurut Sondang P. Siagian (2016), pengawasan adalah proses mengamati pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana, serta melakukan tindakan korektif bila ditemukan penyimpangan. Prinsip ini relevan dalam pelatihan dakwah, di mana setiap kegiatan harus selaras dengan visi dakwah Islam, berorientasi pada pembentukan karakter, dan peningkatan kompetensi peserta. Pengawasan yang baik akan memastikan setiap tahap pelatihan - mulai dari perencanaan materi, metode penyampaian, hingga evaluasi hasil - berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada tujuan.

Dari sisi teori manajemen, pengawasan dapat dibedakan menjadi tiga bentuk utama: pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan korektif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum kegiatan dimulai untuk mencegah kesalahan, seperti memastikan kelengkapan instrumen pelatihan dan kesiapan instruktur. Pengawasan represif dilakukan saat kegiatan berlangsung untuk mengontrol pelaksanaan, sedangkan pengawasan korektif dilakukan setelah kegiatan selesai untuk menilai hasil serta memberikan rekomendasi perbaikan. Ketiga jenis pengawasan ini harus berjalan berkesinambungan agar siklus manajemen pelatihan dakwah menjadi utuh.

Dalam perspektif Islam, konsep pengawasan juga memiliki landasan teologis yang kuat. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT adalah Maha Mengawasi segala perbuatan manusia: "Dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu." (QS. Al-Ahzab: 52).

Ayat ini mengandung makna bahwa setiap aktivitas manusia, termasuk dakwah, harus dilandasi rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pengawasan Allah. Prinsip ini menjadi dasar terbentuknya sistem pengawasan Islami yang menekankan nilai kejujuran, amanah, dan profesionalisme dalam bekerja.

Secara teoritis, pengawasan juga berkaitan erat dengan teori sistem (system theory) dalam manajemen. Menurut Lubis (2015), organisasi yang efektif harus memiliki mekanisme umpan balik (feedback loop) untuk memperbaiki penyimpangan dan meningkatkan kinerja. Dalam pelatihan dakwah, mekanisme ini diwujudkan dalam bentuk evaluasi peserta, observasi terhadap instruktur, serta penyempurnaan kurikulum berdasarkan hasil pengawasan.

Dengan demikian, landasan teori pengawasan dalam manajemen pelatihan dakwah memadukan prinsip manajerial modern dengan nilai-nilai Islam. Pengawasan bukan hanya alat kontrol, melainkan sarana pembinaan yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kualitas administratif dan spiritual. Melalui penerapan pengawasan yang objektif, partisipatif, konstruktif, dan berkesinambungan, lembaga dakwah dapat menghasilkan pelatihan yang lebih efektif, melahirkan dai profesional, serta memperkuat peran dakwah dalam membangun masyarakat yang berakhlak mulia dan berwawasan luas sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah.

PEMBAHASAN

Manajemen Pengawasan dalam Pelatihan Dakwah

Pelatihan dakwah merupakan bagian penting dari proses pengembangan kualitas kader, pendakwah, pengajar, maupun penggerak organisasi Islam. Di dalam proses pelatihan, diperlukan suatu sistem manajemen yang komprehensif, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan. Di antara empat fungsi dasar manajemen, pengawasan (controlling) merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan pelatihan karena berfungsi memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana, standar mutu terpenuhi, serta tujuan dakwah dapat dicapai secara efektif.

Dalam literatur manajemen dakwah, pengawasan dipahami sebagai proses untuk mengevaluasi, mengatur, dan memastikan kegiatan dakwah berada pada jalur yang benar

sesuai visi dan tujuan organisasi. Tanpa pengawasan yang sistematis, pelatihan dakwah berpotensi mengalami ketidaksinkronan antara kurikulum dengan implementasi, lemahnya kualitas output peserta, hingga kegagalan dalam menyampaikan pesan dakwah secara efektif.

Keberhasilan dalam mengelola pelatihan dakwah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang ada di sekitarnya. Faktor-faktor ini dapat memberikan dampak positif yang mendukung kelancaran program atau justru menjadi tantangan yang harus di atasi. Elemen lingkungan seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, kebijakan pemerintah, serta kemajuan teknologi menjadi bagian penting yang perlu diperhitungkan dalam penyelenggaraan pelatihan dakwah. Dukungan dari masyarakat, akses terhadap sumber daya, serta perkembangan digital yang semakin pesat dapat membantu meningkatkan efektivitas program. Namun, di sisi lain, keterbatasan ekonomi, regulasi yang ketat, atau perbedaan budaya dapat menjadi hambatan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang lingkungan sekitar sangat diperlukan agar pelatihan dakwah dapat dirancang dengan strategi yang tepat dan memberikan hasil yang optimal.¹

Manajemen pengawasan dalam pelatihan dakwah merupakan salah satu aspek paling penting dalam memastikan keberhasilan proses pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kompetensi para dai. Dalam konteks lembaga dakwah, pengawasan bukan hanya dimaknai sebagai kegiatan memeriksa kesalahan, tetapi lebih luas sebagai aktivitas sistematis untuk memastikan seluruh rangkaian pelatihan berjalan efektif, efisien, dan sesuai tujuan. Menurut George R. Terry, pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mengukur setiap penyimpangan agar organisasi dapat berjalan pada jalur yang benar. Dalam pelatihan dakwah, definisi ini relevan karena pengawasan membantu menjaga kualitas materi, metode kualifikasi, kompetensi pelatih, hingga sikap peserta dakwah agar sesuai standar kompetensi dai yang diharapkan.

Dalam kegiatan pelatihan dakwah, pengawasan memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa seluruh proses pelatihan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindak lanjut dilaksanakan secara profesional dan berorientasi pada peningkatan kualitas dakwah masyarakat. Karena dakwah berhubungan dengan pembentukan karakter, akhlak, dan kesadaran spiritual masyarakat, maka pelatihan dai harus diselenggarakan dengan sistem yang jelas dan pengawasan yang ketat. Harun Nasution menjelaskan bahwa dakwah merupakan kegiatan mengajak manusia menuju kebaikan, maka proses pelatihan dai tidak boleh dilakukan secara sembarangan; ia perlu mengikuti prinsip-prinsip ilmiah, pedagogis, dan manajerial yang benar. Dengan demikian, pengawasan berfungsi sebagai penjaga kualitas agar para dai benar-benar siap secara ilmu, keterampilan, maupun etika dalam menyampaikan risiko.

Selain itu, pengawasan dalam pelatihan dakwah juga berfungsi mengidentifikasi hambatan atau kekurangan dalam proses pembelajaran. Dalam pelatihan dai, sering ditemukan masalah seperti kurangnya partisipasi peserta, kurang efektifnya metode yang digunakan, atau materi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dakwah kontemporer. Melalui fungsi pengawasan ini, lembaga dakwah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat. Menurut Sondang P. Siagian, salah satu prinsip penting dalam pengawasan adalah memberikan umpan balik (umpan balik) untuk menjamin perbaikan terus menerus di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan bukan hanya memeriksa tetapi juga mengembangkan kualitas pelatihan dari waktu ke waktu.

¹ Sugiharto, *Strategi Dakwah Efektif: Pendekatan Manajerial dalam Pembinaan Dai*, (Deepublish: 8 Oktober 2025), hal. 31

Pengawasan juga berkaitan erat dengan kualitas instruktur atau pelatih dakwah. Pelatih yang tidak kompeten akan menghasilkan dai yang tidak kompeten pula. Oleh karena itu, lembaga pelatihan perlu memastikan bahwa instruktur yang ditugaskan benar-benar memiliki kompetensi keilmuan, pedagogi, dan pengalaman dakwah yang mumpuni. Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya tentang adab berdakwah menjelaskan bahwa seorang dai harus memiliki ilmu yang kuat, hikmah, ketulusan, serta kemampuan komunikasi yang baik, sehingga lembaga pelatihan harus mengawasi kualitas para pelatih agar mampu menanamkan nilai-nilai tersebut kepada peserta. Pengawasan ini mencakup penilaian terhadap metode yang digunakan oleh pelatih, kedalaman materi yang disampaikan, serta cara mereka mengelola kelas.

Dalam perspektif manajemen Islam, pengawasan merupakan bagian dari prinsip hisbah, yaitu pengawasan moral dan sosial untuk memastikan terciptanya kebaikan dan mencegah kemungkaran. Al-Mawardi menyebut hisbah sebagai aktivitas untuk memastikan masyarakat berjalan sesuai nilai-nilai syariat dan etika. Dalam konteks pelatihan dakwah, hisbah dapat dipahami sebagai bentuk pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan spiritual. Artinya, lembaga pelatihan tidak hanya mengawasi proses teknis pelatihan, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai keikhlasan, amanah, dan profesionalisme tertanam dalam seluruh aktivitas pelatihan.

Dari sisi teknis manajemen, pengawasan dalam pelatihan dakwah melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, menetapkan standar pelatihan yang jelas. Standar ini meliputi pencapaian pembelajaran, kompetensi inti yang harus dimiliki, metode pelatihan, indikator keberhasilan, hingga etika dakwah yang harus dikuasai. Menurut Handoko, pengawasan yang efektif hanya dapat dilakukan jika terdapat standar yang jelas untuk dijadikan acuan. Dalam pelatihan dakwah, standar ini sangat penting agar lembaga dapat menilai apakah peserta telah mengalami peningkatan kompetensi atau belum.

Tahap kedua adalah pengukuran atau monitoring terhadap pelaksanaan pelatihan. Pemantauan dilakukan dengan cara mengamati langsung proses belajar mengajar, melakukan penilaian terhadap partisipasi peserta, menyebarkan efektivitas metode yang digunakan, serta mencatat seluruh dinamika selama pelatihan berlangsung. Monitoring dapat dilakukan melalui instrumen seperti absensi, lembar observasi, penilaian keterampilan praktik dakwah, hingga rekaman video. Menurut Oemar Hamalik, monitoring dalam pendidikan berfungsi untuk melihat sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai dan apa saja faktor penghambatnya. Dalam pelatihan dakwah, monitoring sangat penting agar lembaga dapat mengukur apakah peserta memiliki kemampuan retorika, kemampuan membaca situasi, serta kemampuan memahami audiens dakwah.

Tahap ketiga adalah membandingkan antara hasil pelatihan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara target dan hasil yang diperoleh, maka lembaga pelatihan harus segera mengidentifikasi penyebabnya. Dalam hal ini, pengawasan tidak hanya melihat kesalahan peserta, tetapi juga mengidentifikasi kekurangan dalam sistem itu pelatihan itu sendiri. Menurut Griffin, analisis kompresi ini penting agar organisasi dapat melakukan perbaikan yang sistematis dan terencana.^[8] Misalnya, jika hasil pengukuran menunjukkan bahwa peserta kurang terampil dalam teknik public speaking, maka lembaga dapat menambah jam latihan praktik atau menghadirkan pelatih tamu yang lebih kompeten.

Tahap keempat adalah tindakan korektif atau perbaikan. Tindakan korektif memastikan inti dari fungsi pengawasan karena bahwa masalah yang ditemukan selama proses pelatihan

dapat diselesaikan dengan baik. Dalam konteks pelatihan dakwah, perbaikan ini bisa berupa revisi kurikulum, peningkatan kualitas pelatih, perubahan metode pembelajaran, penambahan fasilitas latihan, atau pelatihan khusus bagi peserta yang membutuhkan. Menurut Terry, tindakan korektif adalah proses penting agar organisasi tetap berada pada jalur tujuan yang telah ditetapkan.^[9]

Selain tahapan teknis tersebut, pengawasan dalam pelatihan dakwah juga harus memperhatikan pendekatan humanis. Peserta pelatihan bukan hanya objek yang dinilai, tetapi manusia yang memiliki potensi, emosi, motivasi, dan latar belakang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan dengan pendekatan komunikasi yang baik dan tanpa menimbulkan tekanan psikologis yang berlebihan. Menurut Paulo Freire, pendidikan harus memerdekakan dan membangun manusia, bukan menekan atau mengobjektifikasi mereka. Prinsip ini penting diterapkan dalam pelatihan dakwah agar peserta merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berkembang.

Pengawasan juga perlu melihat aspek spiritual peserta dakwah. Dakwah bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga panggilan hati. Oleh karena itu, pelatihan dakwah harus memperhatikan aspek moralitas dan spiritualitas peserta, seperti keikhlasan, kesabaran, empati, dan adab dalam berbicara. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa dakwah harus bersumber dari hati yang penuh keikhlasan karena apa yang keluar dari hati akan masuk ke hati. Dalam konteks pengawasan, lembaga harus memastikan bahwa pelatih dan peserta tidak hanya menguasai teori dakwah tetapi juga kualitas spiritual yang mendukungnya.

Dalam pelatihan dakwah modern, pengawasan juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Banyak lembaga dakwah kini memanfaatkan media digital dalam pelatihan, seperti penggunaan video, platform belajar berani, media sosial, dan aplikasi manajemen kelas. Pengawasan harus memastikan bahwa seluruh pemanfaatan teknologi berjalan efektif dan tidak menimbulkan gangguan. Menurut Mulyasa, integrasi teknologi dalam pendidikan memerlukan pengawasan ketat agar tetap relevan dengan tujuan pembelajaran. Selain itu, dai masa kini harus mengajarkan bagaimana berdakwah melalui media digital dengan etika yang benar.

Pengawasan juga memiliki peran strategi dalam melihat perkembangan kompetensi peserta secara individu. Setiap peserta memiliki tingkat pemahaman dan keterampilan yang berbeda-beda, sehingga pengawasan dapat membantu pelatih memberikan pendampingan yang lebih personal. Dalam teori manajemen pendidikan modern, konsep ini dikenal sebagai pengawasan formatif, yaitu pengawasan yang bertujuan membantu peserta berkembang melalui pendekatan pelatihan.

Selain pengawasan internal, lembaga pelatihan dakwah juga perlu melibatkan pengawasan eksternal, seperti kerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi, lembaga pemerintah, atau organisasi dakwah nasional. Pengawasan eksternal memberikan perspektif tujuan agar kualitas pelatihan tetap sesuai standar nasional. Menurut Hasibuan, pengawasan eksternal diperlukan untuk menjaga akuntabilitas lembaga pelatihan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Secara keseluruhan, manajemen pengawasan dalam pelatihan dakwah adalah proses menyeluruh yang mencakup aspek administratif, pedagogis, moral, dan spiritual. Pengawasan memastikan bahwa dai yang dihasilkan tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga memiliki integritas, profesionalisme, dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Dengan pengawasan yang baik, lembaga dakwah dapat menjadi pusat pelatihan yang berkualitas,

responsif terhadap kebutuhan zaman, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Hakikat Manajemen Pengawasan dalam Pelatihan Dakwah

1. Pengertian Pengawasan

Secara umum, pengawasan (control) adalah proses untuk mengamati pelaksanaan kegiatan organisasi agar sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. George R. Terry yang banyak dikutip dalam literatur manajemen Indonesia—menyatakan bahwa controlling adalah proses menentukan apa yang sedang dilakukan, menilai, dan mengoreksi jika terjadi penyimpangan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana sebelumnya. Dalam konteks Indonesia, Samsul Munir Amin mengadaptasi konsep ini dalam manajemen dakwah, dengan menekankan bahwa pengawasan dalam dakwah merupakan proses memastikan bahwa semua usaha dakwah berjalan dalam koridor syariat, visi dakwah, serta standar profesional.²

Dalam pelatihan dakwah, pengawasan dilakukan dengan tujuan menjaga kualitas proses pembelajaran, efektivitas kurikulum, profesionalitas pelatih, serta perkembangan peserta. Proses ini mencakup monitoring kegiatan, evaluasi, penilaian, hingga tindak lanjut terhadap temuan dalam pelaksanaan pelatihan.

2. Fungsi Pengawasan dalam Pelatihan Dakwah

Fungsi pengawasan meliputi beberapa aspek, yaitu:

a) Menjamin Kesesuaian dengan Rencana

Pengawasan memastikan bahwa seluruh komponen pelatihan—mulai dari materi, metode, jadwal, hingga output peserta—sesuai dengan rencana awal yang telah disusun.

b) Mendeteksi Penyimpangan

Setiap program pelatihan berpotensi mengalami deviasi. Pengawasan berfungsi mendeteksi penyimpangan tersebut sejak dini.

c) Memberikan Umpan Balik (feedback)

Pengawasan memungkinkan organisasi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) terhadap pelatihan dakwah.

d) Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelatihan

Dengan adanya monitoring, kegiatan pelatihan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

e) Mengoptimalkan Kualitas Dakwah

Kualitas peserta pelatihan akan menentukan kualitas dakwah yang mereka lakukan.

Agar pengawasan berjalan efektif, diperlukan prinsip-prinsip tertentu. Menurut M. Munir dalam bukunya *Manajemen Dakwah*, pengawasan harus memperhatikan beberapa prinsip dasar sebagai berikut:³

1. Objektivitas

Pengawasan harus dilakukan berdasarkan data, fakta lapangan, dan indikator terukur, bukan berdasarkan perasaan, opini, atau subjektivitas personal.

² Samsul Munir Amin, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 112.

³ M. Munir, *Manajemen Dakwah*, Yogyakarta: Kencana, 2012, hlm. 67-68.

2. Keadilan
Proses pengawasan tidak boleh berat sebelah. Semua pelatih dan peserta harus diperlakukan secara profesional.
3. Transparansi
Setiap indikator, standar, dan bentuk penilaian harus disampaikan secara jelas sejak awal kepada peserta maupun pelatih.
4. Berkesinambungan
Pengawasan tidak dapat dilakukan hanya di akhir kegiatan, tetapi harus dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pascapelatihan.
5. Konstruktif
Sasaran pengawasan tidak hanya menemukan kelemahan tetapi memberikan solusi yang membangun.
6. Keterlibatan Semua Pihak
Menurut konsep manajemen partisipatif, pengawasan tidak hanya tugas manajer, tetapi juga melibatkan instruktur, peserta, dan bahkan pihak eksternal (observer).

Jenis-Jenis Pengawasan dalam Pelatihan Dakwah

1. Pengawasan Internal
Dilakukan oleh pihak internal lembaga dakwah, seperti ketua panitia, penanggung jawab program, atau trainer senior. Pengawasan internal berfungsi memastikan bahwa setiap tahap pelatihan sesuai standar operasional dan pedoman dakwah lembaga.⁴
2. Pengawasan Eksternal
Dilakukan oleh pihak luar seperti organisasi induk, lembaga profesional, atau konsultan pelatihan. Pengawasan eksternal membantu memberikan evaluasi yang lebih objektif.
3. Pengawasan Preventif
Dilakukan sebelum pelatihan dimulai, seperti pengecekan kelayakan kurikulum, kesiapan pelatih, dan fasilitas.
4. Pengawasan Repressif
Dilakukan setelah pelatihan berlangsung, seperti evaluasi laporan, penilaian akhir, dan pengukuran kualitas output peserta.
5. Pengawasan Berbasis Standar Mutu (Quality Control)
Dalam pelatihan dakwah modern, standar mutu digunakan untuk menjaga kualitas proses dan hasil pelatihan sesuai standar seperti SOP, modul pelatihan, serta indikator kompetensi dai.⁵

TAHAPAN PENGAWASAN DALAM MANAJEMEN PELATIHAN DAKWAH

Pengawasan dalam manajemen pelatihan dakwah merupakan proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan pelatihan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Pengawasan bukan hanya sekedar mengevaluasi hasil akhir pelatihan, tetapi berfungsi sebagai alat untuk mengontrol, menilai, memperbaiki, serta mengarahkan proses pelatihan agar tetap berada pada jalur yang benar. Dalam konteks dakwah, pelatihan bukan hanya bertujuan menghasilkan peserta yang menguasai teori dakwah,

⁴ Ahmad Satori Ismail, *Manajemen Organisasi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 143.

⁵ Asep Kusnawan, *Manajemen Mutu Pelatihan Dakwah*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011, hlm. 54-55.

melainkan juga membentuk karakter, kepribadian, dan kemampuan praktis dalam menyampaikan pesan agama secara bijaksana dan relevan dengan dinamika sosial yang ada.⁶

Pengawasan saat pelatihan berlangsung adalah proses memantau jalannya kegiatan secara langsung untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pelatihan dakwah berjalan sesuai rencana. Pada tahap ini, pengawas atau panitia bertugas memperhatikan alur pelaksanaan, mulai dari kedisiplinan waktu, interaksi antara fasilitator dan peserta, hingga efektivitas metode yang digunakan saat penyampaian materi. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, namun tetap fleksibel agar tidak mengganggu suasana belajar.

Dalam praktiknya, pengawas biasanya mencatat berbagai kondisi yang muncul, seperti respons peserta, tingkat keterlibatan mereka, kelancaran diskusi, serta bagaimana narasumber mengelola kelas. Jika ditemukan kendala, pengawas dapat segera memberi solusi cepat misalnya memperbaiki teknis peralatan, menyesuaikan durasi sesi, atau memberikan dukungan kepada fasilitator agar materi tersampaikan dengan baik.

Selain itu, pengawasan saat pelatihan juga berkaitan dengan memastikan suasana tetap kondusif. Hal ini meliputi kontrol terhadap dinamika peserta, memastikan tidak ada gangguan yang menghambat konsentrasi, serta memastikan setiap sesi berjalan sesuai jadwal. Dengan adanya pemantauan yang aktif selama pelatihan berlangsung, penyelenggara dapat menjaga kualitas proses belajar dan memastikan tujuan dakwah yang diharapkan benar-benar tercapai melalui pelatihan tersebut.

1. Penetapan Standar dan Indikator Pengawasan

Dalam proses pelatihan dakwah, pengawasan tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa acuan. Supaya pelatihan berjalan sesuai tujuan, maka perlu ada standar dan indikator yang menjadi patokan untuk menilai apakah proses pelatihan sudah sesuai atau belum. Dua hal ini menjadi pondasi utama sebelum pengawasan dilaksanakan.

Pertama, yang dimaksud dengan penetapan standar adalah menentukan batas atau ukuran yang ingin dicapai dari sebuah pelatihan. Standar ini bisa berbentuk tujuan pembelajaran, sikap peserta, keterampilan yang perlu dikuasai, metode penyampaian materi, sampai etika dalam berdakwah. Standar dibuat bukan untuk membatasi, tetapi agar arah pelatihan tidak kabur. Misalnya, dalam pelatihan khutbah, standar yang ditentukan bisa berupa kemampuan menyusun teks khutbah, ketepatan menyampaikan dalil, intonasi suara, hingga sikap tubuh saat berbicara di depan jamaah. Standar ini biasanya dirancang sejak awal oleh penyelenggara atau tim kurikulum. Standar juga harus realistis, tidak terlalu tinggi, namun tetap menantang agar peserta berkembang. Dengan adanya standar, pelatih dan peserta tahu apa yang sedang dituju.

2. setelah standar ditentukan, maka diperlukan indikator pengawasan. Indikator ini lebih spesifik dan mudah diukur. Jika standar adalah tujuan besar, maka indikator adalah ciri-ciri atau tanda yang menunjukkan apakah standar tersebut sudah tercapai atau belum. Indikator dibuat dalam bentuk yang jelas dan terukur sehingga tidak hanya dinilai secara perasaan, tetapi benar-benar berdasarkan fakta. Sebelum pelatihan dilaksanakan, langkah awal dalam pengawasan adalah menetapkan standar atau ukuran yang akan menjadi acuan keberhasilan pelatihan.⁷

Tujuan pelatihan dakwah harus dirumuskan secara jelas dan terukur. Tujuan yang kabur hanya akan menyulitkan proses pelatihan dan pengawasannya. Oleh karena itu, pelatihan dakwah harus dirancang dengan orientasi yang jelas, seperti meningkatkan kemampuan

⁶ Arifin, Zainal. (2018). Manajemen Pendidikan Islam. Jakarta: Rajawali Pers.

⁷ Nata, Abuddin. (2014). Metodologi Studi Islam. Jakarta: RajaGrafindo.

komunikasi, memperkuat kemampuan memahami audiens, serta membentuk dai yang memiliki rasa tanggung jawab dalam menyampaikan ajaran agama. Setiap peserta pelatihan memiliki latar belakang, pengalaman, serta kemampuan yang berbeda. Oleh sebab itu, penting bagi penyelenggara pelatihan untuk memahami profil peserta secara tepat. Dengan mengetahui karakteristik peserta, metode dan pendekatan pelatihan dapat disesuaikan sehingga proses belajar menjadi efektif dan tujuan pelatihan dapat tercapai.⁸

Kompetensi dalam pelatihan dakwah mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Aspek pengetahuan meliputi pemahaman terhadap ajaran Islam serta metode dakwah. Aspek keterampilan mencakup kemampuan berbicara di depan umum, menyusun materi dakwah, dan membangun hubungan dengan jamaah. Sedangkan aspek sikap berkaitan dengan akhlak, ketulusan, kearifan, dan kemampuan menjadi teladan bagi umat.⁹

Instruktur pelatihan dakwah memiliki peran strategis dalam keberhasilan pelatihan. Instruktur harus memiliki kredibilitas, pengalaman nyata di lapangan, serta kemampuan dalam mendidik dan memotivasi peserta. Instruktur yang tidak kompeten dapat berdampak pada rendahnya kualitas output pelatihan.

Fasilitas pelatihan, seperti ruang belajar, peralatan presentasi, modul pelatihan, dan suasana lingkungan, harus disiapkan dengan baik. Kondisi sarana yang kurang memadai dapat menghambat efektivitas pelatihan.

Peserta yang terpilih untuk mengikuti pelatihan harus menerima informasi yang jelas mengenai jadwal, tata tertib, serta tujuan pelatihan. Hal ini bertujuan agar peserta datang dalam kondisi siap dan memiliki motivasi yang tinggi.¹⁰

Instruktur harus diberikan penjelasan mengenai tujuan pelatihan dan karakteristik peserta. Dengan demikian, instruktur dapat menyesuaikan cara penyampaian materi.

Seluruh kebutuhan teknis harus diperiksa dan disiapkan sebelum pelatihan dimulai, termasuk ruang pelatihan, perlengkapan audio-visual, konsumsi, dan bahan ajar.

Pembagian tugas panitia harus jelas dan terstruktur agar semua aspek pelaksanaan berjalan lancar.

1) Pengawasan Saat Pelatihan Berlangsung

Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa proses pelatihan berjalan sesuai rencana.

- Pengawasan Kesesuaian Penyampaian Materi
Materi harus disampaikan sesuai dengan tujuan pelatihan dan kebutuhan peserta.
- Pengawasan Keterlibatan Peserta
Pelatihan harus berlangsung secara interaktif agar peserta terlibat aktif.
- Pengawasan Ketepatan Waktu
Pelaksana harus disiplin dalam mengatur waktu agar pelatihan berjalan efektif.
- Pengawasan Pasca Pelatihan
Pengawasan pasca pelatihan berfungsi untuk mengukur dampak pelatihan.

2) Evaluasi Pemahaman Materi

Dapat dilakukan melalui tes, diskusi, atau tugas.

Pengawasan pasca pelatihan adalah tahap akhir dalam manajemen pelatihan dakwah yang berfungsi untuk menilai sejauh mana pelatihan yang telah dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Pada tahap ini, penyelenggara tidak hanya menilai jalannya kegiatan, tetapi juga mengevaluasi dampak pelatihan terhadap peserta serta keberlanjutan hasil

⁸ Hasbullah. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

⁹ Tasmara, Toto. (2002). *Komunikasi Dakwah*. Jakarta: Gema Insani.

¹⁰ Qardhawi, Yusuf. (1998). *Seni Berdakwah*. Cairo: Dar al-Shuruq.

pembelajaran di lapangan. Pengawasan dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengumpulan umpan balik peserta, penilaian pemahaman materi, serta pengamatan terhadap perubahan kompetensi dakwah setelah pelatihan selesai.

Biasanya, panitia menyebarkan kuesioner evaluasi, melakukan wawancara singkat, atau mengadakan pertemuan tindak lanjut untuk mengetahui apakah materi yang diberikan benar-benar diterapkan. Pengawasan ini juga menyentuh aspek administratif, seperti pencocokan laporan keuangan, dokumentasi, serta hasil kerja fasilitator selama proses pelatihan.

Selain itu, pengawasan pasca pelatihan membantu lembaga dakwah mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki untuk pelatihan berikutnya. Apakah metode sudah tepat, apakah durasi efektif, atau apakah peserta membutuhkan pendampingan lanjutan. Dengan adanya tahap ini, pelatihan tidak berhenti pada seremonial kegiatan, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata. Pengawasan pasca pelatihan menjadi pondasi bagi peningkatan kualitas program, sekaligus memastikan bahwa tujuan dakwah yang ditargetkan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Proses Pengawasan dalam Manajemen Pelatihan Dakwah

Dr. K.H. Didin Hafidhuddin menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam, terdapat dua bentuk pengawasan. Pertama, pengawasan yang bersumber dari dalam diri seseorang, yaitu pengawasan yang berlandaskan pada tauhid dan keimanan kepada Allah. Individu (diri sendiri) yang meyakini bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap hamba-Nya akan selalu berhati-hati dalam bertindak serta merasa dirinya terus berada dalam pantauan Allah. Kedua, pengawasan yang datang dari luar diri individu. Pengawasan ini merupakan sistem kontrol eksternal yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan dari atasan terhadap pelaksanaan tugas yang telah didelegasikan, mencakup kesesuaian antara perencanaan dan penyelesaian tugas, serta aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan tanggung jawab kerja.¹¹

Dalam hal ini, terkait dengan proses pengawasan dalam manajemen pelatihan dakwah, tentunya pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang kedua yaitu pengawasan yang datang dari luar diri individu (diri sendiri). Secara umum proses dasar pengawasan paling tidak harus melalui empat tahap, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Menetapkan standar

Menurut Ibrahim Lubis yang dikutip oleh Mufham Al Amin, penetapan standar merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan pengawasan. Hal ini penting karena standar berfungsi sebagai tolok ukur atau alat pembanding dalam proses pengawasan untuk menilai apakah kegiatan yang sedang atau telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2. Mengukur hasil kerja

Tahapan selanjutnya adalah melakukan pengukuran terhadap hasil kerja setelah standar ditentukan. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan dan standar yang ada, serta untuk mencegah timbulnya masalah atau penyimpangan selama proses berlangsung. Pengukuran dapat dilakukan melalui laporan lisan maupun tertulis, melalui pengamatan langsung (observasi), atau melalui studi dokumentasi.

¹¹ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 156

¹² Mufham Al Amin, *Manajemen Pengawasan: Refleksi dan Kesaksian Seorang Auditor*, (Ciputat: Kalam Indonesia, 2006), hal. 89-

3. Melakukan perbandingan

Langkah berikutnya ialah membandingkan hasil pengukuran dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara hasil yang dicapai dengan standar yang telah direncanakan, dan jika ada, seberapa besar perbedaannya. Dari hasil perbandingan tersebut dapat ditentukan apakah diperlukan tindakan perbaikan atau tidak.

4. Melakukan perbaikan atau koreksi terhadap penyimpangan

Tahap terakhir adalah melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang terjadi. Tahapan ini sangat penting karena semakin cepat tindakan koreksi dilakukan, semakin efektif pula pencapaian tujuan pengawasan. Prinsip utama pengawasan adalah melakukan perbaikan terhadap setiap kemungkinan kesalahan atau penyimpangan. Tindakan koreksi dapat dilakukan segera apabila penyimpangan bersifat ringan dan mudah diperbaiki. Namun, jika kesalahan yang terjadi bersifat berat dan tidak memungkinkan untuk diperbaiki saat itu juga, maka koreksi dapat dilakukan setelah kegiatan berakhir. Selain itu, perbaikan juga dapat diterapkan pada periode berikutnya melalui pembaruan perencanaan atau penetapan standar yang baru.

Perlu diketahui bahwasanya ketika melakukan proses pengawasan, kita harus mengenal siapa sasaran pengawasannya. Sondang P. Siagian menyatakan bahwa sasaran pengawasan mencakup seluruh hal yang terjadi di dalam suatu organisasi atau lembaga. Dengan kata lain, pengawasan harus bersifat menyeluruh sehingga tidak ada satu pun aspek dari pelaksanaan kegiatan operasional yang terlepas dari jangkauan pengawasan. Terkait dengan proses perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan, sasaran pengawasan dapat diarahkan pada upaya menjawab sejumlah pertanyaan, seperti: apa yang sedang atau akan dilakukan; di mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan; kapan kegiatan itu akan berlangsung; tata kerja serta mekanisme apa yang akan diterapkan; siapa yang bertanggung jawab atas setiap bagian pekerjaan; dan mengapa keputusan-keputusan mengenai kelima hal tersebut diambil.¹³

Pada hakikatnya, pengawasan memiliki makna sebagai upaya menjaga stabilitas dan keseimbangan. Untuk mempertahankan keseimbangan tersebut, seorang pemimpin perlu senantiasa menyesuaikan tindakan yang dilakukan atau memperbaiki standar yang digunakan sebagai acuan dalam menilai pelaksanaan kegiatan. Selain itu, berbagai teknik dan metode pengawasan sebaiknya diterapkan secara bersamaan dan terpadu, bukan dijalankan secara terpisah satu sama lain.¹⁴

Dalam konteks pengawasan dalam manajemen pelatihan dakwah, makna menjaga stabilitas dan keseimbangan dapat dipahami sebagai upaya untuk memastikan bahwa seluruh proses pelatihan dakwah berjalan sesuai dengan tujuan, nilai-nilai Islam, serta rencana yang telah ditetapkan. Penyelenggara pelatihan dakwah perlu menjaga keseimbangan antara aspek spiritual, intelektual, dan teknis dalam pelatihan. Hal ini berarti ia harus mampu menyesuaikan metode, materi, maupun standar evaluasi sesuai dengan kondisi peserta, situasi lapangan, dan tantangan dakwah yang dihadapi. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol administratif, tetapi juga sebagai sarana pembinaan agar kualitas pelatihan terus meningkat.

Selain itu, teknik dan metode pengawasan dalam pelatihan dakwah sebaiknya diterapkan secara terpadu dan berkelanjutan, bukan secara terpisah. Misalnya, melalui observasi langsung

¹³ Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Edisi Revisi), (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 136

¹⁴ Hani Handoko, *Manajemen Personal dan Sumber Daya Manusia* edisi 2, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2001) hal. 375

terhadap proses penyampaian materi, evaluasi laporan hasil kegiatan, hingga umpan balik dari peserta pelatihan. Pendekatan yang simultan ini akan membantu penyelenggara mendeteksi penyimpangan atau ketidaksesuaian sejak dini dan melakukan perbaikan dengan cepat, sehingga tujuan pelatihan dakwah dapat tercapai secara optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Karakteristik dan Syarat Pengawasan Efektif dalam Perspektif Islam

Dalam Manajemen Pelatihan Dakwah, pengawasan (controlling) tidak dapat dilakukan secara asal-asalan karena posisi kontrol dalam sebuah program dakwah bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis, tetapi juga sebagai penjaga integritas syariah dan kualitas pesan yang disampaikan. Oleh sebab itu, pengawasan harus berlandaskan prinsip-prinsip etis Islam yang mengedepankan kejujuran, kehati-hatian, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Para pakar manajemen syariah menegaskan bahwa pengawasan yang ideal adalah pengawasan yang menjunjung tinggi prinsip tabayyun (klarifikasi) serta menghindari sikap su'udzon atau prasangka buruk. Prinsip ini sejalan dengan larangan Al-Qur'an terhadap tindakan tajassus, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain tanpa alasan yang sah secara moral maupun syariah, sehingga pengawasan dalam pelatihan dakwah harus diarahkan untuk memperbaiki, bukan menjatuhkan.

Dalam konteks praktis, pengawasan yang efektif mencakup sejumlah syarat yang perlu dipenuhi agar proses controlling berjalan secara profesional dan tetap mencerminkan nilai-nilai dakwah. Pertama, pengawasan harus objektif dan akurat, di mana seluruh data maupun evaluasi, seperti presensi peserta atau efektivitas penyampaian materi oleh narasumber, harus bersumber dari fakta lapangan, bukan sekadar interpretasi subjektif pengawas.¹⁵ Sikap objektif ini penting agar setiap keputusan atau rekomendasi benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara tim pelaksana.

Kedua, pengawasan harus bersifat preventif (pencegahan). Fungsi pencegahan ini menjadikan pengawasan tidak hanya berhenti pada deteksi kesalahan yang sudah terjadi, tetapi mampu mengantisipasi potensi hambatan sebelum kegiatan berlangsung. Contohnya, memastikan kesiapan teknis seperti fungsi sound system, kesiapan ruangan, hingga kelengkapan materi dakwah yang akan dibawakan oleh pemateri.¹⁶ Pengawasan preventif tidak hanya menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga menjamin pelaksanaan pelatihan berjalan lancar tanpa gangguan yang sebenarnya dapat dihindari.

Ketiga, pengawasan harus fleksibel, artinya standar dan metode pengawasan harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lapangan. Kondisi peserta, perubahan agenda, maupun faktor teknis yang tidak terduga menuntut pengawas untuk tidak kaku dalam menjalankan prosedur, selama fleksibilitas tersebut tidak mengorbankan tujuan utama dakwah ataupun nilai-nilai syariah yang menjadi pijakan kegiatan.

Keempat, pengawasan yang baik harus komunikatif. Temuan lapangan dan hasil evaluasi perlu disampaikan kepada panitia maupun peserta dengan bahasa yang santun, lembut, dan membangun (*qaulan layyin*), sehingga setiap bentuk koreksi dapat diterima dengan lapang dada dan tidak menimbulkan resistensi. Komunikasi yang etis dan persuasif juga memastikan bahwa perbaikan dapat dijalankan dengan lebih efektif dan tidak memunculkan konflik interpersonal di dalam tim.

¹⁵ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 243.

¹⁶ A. Rosyad Sholeh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), hlm. 112.

Secara keseluruhan, karakteristik dan syarat tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dalam pelatihan dakwah bukan sekadar prosedur administratif, tetapi bagian dari proses spiritual dan etis yang menjaga keberlanjutan dakwah agar tetap sesuai dengan tujuan syariah serta mengedepankan nilai-nilai kemaslahatan.

Hambatan dalam Proses Pengawasan dan Solusinya

Dalam praktik manajemen pelatihan dakwah, proses pengawasan tidak selalu berjalan mulus karena berhadapan dengan berbagai hambatan yang bersifat psikologis, struktural, maupun metodologis. Hambatan-hambatan ini, apabila tidak diidentifikasi dan ditangani secara tepat, dapat menurunkan efektivitas pelaksanaan pelatihan dan mengaburkan tujuan dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor penghambat sekaligus merumuskan solusi yang sistematis menjadi aspek penting dalam membangun sistem pengawasan yang profesional dan berorientasi pada kualitas.

Salah satu hambatan yang sering muncul adalah hambatan psikologis, terutama muncul dari budaya ewuh pakewuh, yaitu rasa sungkan atau tidak enak hati ketika harus memberikan teguran, kritik, atau evaluasi kepada sesama aktivis dakwah. Situasi ini sering diperparah oleh anggapan bahwa hubungan persaudaraan (*ukhuwah islamiyah*) harus diutamakan sehingga menegur kinerja dianggap sebagai tindakan yang dapat merusak keharmonisan. Akibatnya, banyak pengawas atau panitia enggan untuk mengemukakan kekurangan, padahal koreksi tersebut penting untuk meningkatkan kualitas kegiatan.¹⁷ Hambatan psikologis ini membuat pengawasan menjadi tidak objektif dan cenderung mengabaikan masalah yang sebenarnya membutuhkan penyelesaian.

Hambatan lainnya adalah kurangnya standar yang terukur dalam pelatihan dakwah. Banyak kegiatan dakwah dilaksanakan tanpa indikator keberhasilan yang jelas, seperti *Key Performance Indicators* (KPI) atau tolok ukur evaluasi yang terstruktur. Ketidakadaan standar tersebut menyebabkan proses evaluasi menjadi sangat subjektif misalnya hanya mengandalkan perasaan bahwa acara berjalan lancar, tanpa data atau parameter yang konkret. Ketika standar tidak ditetapkan sejak awal, pengawas akan kesulitan menentukan apakah pelatihan telah mencapai target, dan tim pelaksana pun tidak memiliki acuan untuk memperbaiki aspek-aspek yang kurang.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat edukatif sekaligus sistematis. Pertama, penting untuk membangun cara pandang bahwa pengawasan dan saling menasihati dalam kebenaran (*tawashi bil haq*) bukanlah tindakan yang berpotensi merusak ukhuwah, tetapi justru bagian integral dari memperkuatnya. Dengan memahami bahwa kritik dilakukan dalam rangka perbaikan, bukan personalisasi kesalahan, para aktivis dakwah akan lebih siap menerima evaluasi sebagai bentuk kepedulian dan amanah.

Kedua, penyusunan instrumen pengawasan tertulis, seperti form checklist atau standar operasional pengawasan, menjadi solusi yang sangat efektif. Dokumen ini disepakati bersama sebelum pelatihan dimulai, sehingga pengawasan dilakukan berdasarkan sistem yang jelas, bukan berdasarkan penilaian personal atau sentimen individu.¹⁸ Dengan demikian, proses pengawasan menjadi lebih transparan, terukur, dan mudah dievaluasi, sekaligus meminimalisasi potensi konflik interpersonal yang biasanya muncul akibat penilaian subjektif.

¹⁷ Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 145.

¹⁸ George R. Terry, *Principles of Management*, (Homewood: Richard D. Irwin, Inc, 2012), diterjemahkan oleh G.A. Ticoalu, hlm. 167.

Dengan menghadirkan solusi yang bersifat edukatif dan sistemik ini, pengawasan dalam pelatihan dakwah dapat berjalan lebih profesional, berorientasi pada peningkatan kualitas, serta tetap selaras dengan nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan semangat saling menasihati dalam kebaikan.

Teknik Pengawasan Operasional dalam Pelatihan Dakwah

Dalam manajemen pelatihan dakwah, penerapan teknik pengawasan operasional menjadi salah satu kunci utama untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan secara terarah, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengawasan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pemantauan sesaat, tetapi sebagai sebuah pendekatan sistematis yang mencakup proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang berlangsung secara berkesinambungan. Para ahli manajemen menegaskan bahwa pengawasan yang baik harus berfungsi menjaga kesesuaian antara tujuan, prosedur, dan pelaksanaan, sehingga seluruh kegiatan tetap berada pada jalur yang direncanakan serta mampu menghasilkan output yang diinginkan. Hal ini sejalan dengan pendapat George R. Terry yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan upaya memastikan kegiatan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan.¹⁹ Selain itu, konsep pengawasan dalam Islam juga memiliki dimensi spiritual, yaitu memastikan bahwa setiap aktivitas dakwah tidak melenceng dari nilai-nilai akhlak, amanah, dan kejujuran sebagai fondasi etis seorang da'i.

Untuk memperkuat aspek operasional, terdapat tiga teknik pengawasan yang lazim diterapkan dalam event pelatihan dakwah modern, yaitu *feedforward control*, *concurrent control*, dan *feedback control*. Ketiga teknik ini bersifat saling melengkapi dan membentuk suatu rangkaian pengawasan yang utuh mulai dari tahap sebelum pelatihan, saat pelatihan, hingga setelah pelatihan selesai. Pembagian teknik ini sejalan dengan teori pengendalian kontemporer yang menyatakan bahwa pengawasan harus mencakup upaya pencegahan, upaya pengendalian langsung, dan upaya evaluasi mendalam.²⁰

Teknik pertama adalah Pengawasan Pendahuluan (*Feedforward Control*). Teknik ini dilakukan sebelum pelatihan dimulai dan berfungsi untuk mengantisipasi potensi masalah sehingga kegiatan dapat berjalan tanpa hambatan. Dalam pelatihan dakwah, *feedforward control* dapat diwujudkan melalui seleksi ketat terhadap peserta untuk memastikan kesiapan mental, motivasi, dan kemampuan dasar mereka, serta verifikasi kredibilitas materi dakwah agar tidak ada konten yang menyimpang dari aqidah dan manhaj Islam. Pandangan ini sejalan dengan teori manajemen yang dikemukakan oleh Harold Koontz bahwa *feedforward control* bertujuan mendeteksi masalah sebelum masalah tersebut muncul, sehingga memungkinkan organisasi mengambil langkah strategis sejak awal. Dalam perspektif dakwah, pengawasan pendahuluan juga mencakup kesiapan teknis seperti ketersediaan ruang, kesiapan logistik, kelengkapan alat presentasi, dan kesesuaian jadwal agar pelaksanaan berlangsung optimal. Dengan demikian, pengawasan tahap ini berfungsi sebagai pagar pertama yang memastikan bahwa seluruh persiapan telah memenuhi standar kualitatif dan syariah yang diharapkan.

Teknik kedua adalah Pengawasan Berjalan (*Concurrent Control*), yaitu pengawasan yang dilakukan secara langsung saat pelatihan sedang berlangsung. Dalam praktiknya, panitia pengawasan memantau berbagai aspek seperti durasi pemaparan materi oleh narasumber, kondisi fokus peserta, dinamika diskusi, hingga kepatuhan terhadap tata tertib ruang pelatihan.

¹⁹ George R. Terry, *Principles of Management*, (Homewood: Richard D. Irwin, Inc, 2012), diterjemahkan oleh G.A. Ticoalu, hlm. 98.

²⁰ Harold Koontz & Cyril O'Donnell, *Essentials of Management*, New York: McGraw-Hill, 1976, hlm. 142-143.

Sebagai contoh, panitia seksi acara harus memastikan bahwa narasumber tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan dan seluruh peserta tetap berada di ruangan tanpa alasan yang tidak relevan.²¹ Pengawasan berjalan menjadi sangat penting karena bersifat responsif dan memungkinkan tim pengawas melakukan koreksi secara real-time terhadap kesalahan atau penyimpangan yang muncul. Henry Fayol dalam teorinya menyebut bahwa salah satu aspek penting manajemen adalah pengendalian (controlling) yang harus dilakukan selama proses berlangsung untuk memastikan efektivitas pelaksanaan.²² Dalam ruang dakwah, pengawasan berjalan juga bertujuan menjaga adab majelis, kualitas interaksi, serta memastikan bahwa suasana kegiatan tetap kondusif dan mencerminkan nilai-nilai keislaman.

Teknik ketiga adalah Pengawasan Umpan Balik (*Feedback Control*). Pengawasan ini dilakukan setelah pelatihan selesai sebagai bagian dari evaluasi komprehensif. Bentuk feedback control biasanya mencakup analisis hasil pre-test dan post-test peserta untuk menilai sejauh mana pelatihan meningkatkan pemahaman keagamaan, retorika dakwah, maupun kemampuan praktis lainnya. Robert J. Mockler menekankan bahwa *feedback control* adalah proses pengendalian yang ditujukan untuk mengevaluasi hasil akhir dan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga dapat dijadikan dasar perbaikan untuk kegiatan selanjutnya.²³ Dalam konteks dakwah, evaluasi tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga menyentuh dimensi spiritual dan emosional, misalnya menilai sejauh mana peserta mengalami peningkatan motivasi beramal, kepekaan sosial, atau komitmen untuk menyebarkan dakwah secara berakhlak. Feedback yang dikumpulkan ini kemudian dianalisis oleh panitia untuk menyusun rekomendasi strategis bagi pelatihan berikutnya agar kualitas materi, metode penyampaian, dan sistem pengawasan dapat ditingkatkan.

Secara keseluruhan, penerapan tiga teknik pengawasan ini membentuk suatu sistem pengendalian terpadu yang sangat diperlukan untuk menjamin efektivitas pelatihan dakwah. Pengawasan pendahuluan berfungsi mencegah masalah sejak awal, pengawasan berjalan memastikan pelaksanaan tetap terkendali, dan pengawasan umpan balik menjamin bahwa kegiatan menghasilkan dampak yang terukur serta memberikan masukan strategis yang bermanfaat untuk program selanjutnya. Dengan sistem pengawasan yang terstruktur dan berbasis teori ilmiah sekaligus nilai syariah, pelatihan dakwah

PENUTUP

Kesimpulan

Pengawasan merupakan bagian integral dari manajemen pelatihan dakwah yang bertujuan menjaga agar seluruh proses pelatihan berjalan sesuai dengan standar, rencana, dan nilai-nilai Islam. Fungsi pengawasan mencakup penetapan standar, pengukuran hasil kerja, perbandingan dengan standar, serta tindakan koreksi atas penyimpangan yang terjadi. Dalam konteks dakwah, pengawasan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga spiritual, yang bertujuan membina moral, disiplin, dan profesionalisme para dai. Dengan penerapan prinsip objektivitas, partisipasi, kontinuitas, dan konstruktivitas, pengawasan dapat meningkatkan efektivitas pelatihan serta memperkuat misi amar ma'ruf nahi munkar secara berkelanjutan.

²¹ T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2011), hlm. 360-362.

²² Henry Fayol, *General and Industrial Management*, London: Pitman Publishing, 1949, hlm. 112.

²³ Robert J. Mockler, *Management Control*, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1970, hlm. 55.

DAFTAR PUSAKA

- Al Amin, M. (2018). *Manajemen Dakwah Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hafidhuddin, D. (2007). *Manajemen Dakwah Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Handoko, H. (2001). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia edisi 2*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Lubis, I. (2015). *Pengantar Manajemen Dakwah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Siagian, S. P. (2016). *Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Terry, G. R. (2013). *Principles of Management*. New York: Richard D. Irwin Inc.
- Mufham, A. (2019). *Dasar-Dasar Manajemen Dakwah: Pendekatan Sistematis terhadap Kelembagaan Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Quraish Shihab, M. (2002). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rivai, V. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.